

KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	9
a. Fungsionalisasi.....	9
b. Undang-Undang.....	10
c. Tindak Pidana Korupsi	11
d. Hakim	12
e. Peradilan Pidana	13
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Relatif Pidana.....	14
2. Teori Keadilan Hans Kelsen	18
3. Teori Pertimbangan Hakim	21
G. Metode Penelitian.....	24
1. Metode Pendekatan.....	25

2. Jenis Penelitian	25
3. Sumber Data	26
4. Metode Pengumpulan Data	27
5. Metode Penyajian Data.....	28
6. Metode Analisis Data	28
H. Sistematika Penulisan.....	29
 BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	30
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	36
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	36
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	42
C. Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman.....	48
1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman	48
2. Tugas dan Peranan Peradilan.....	53
3. Pengawasan Terhadap Hakim	55
D. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana.....	60
1. Pengertian dan Konsep Sistem Peradilan Pidana	60
2. Asas dan Model Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	65
3. Proses Peradilan Pidana di Indonesia	72
E. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Islam	85

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsionalisasi Undang-Undang Tipikor Dalam Putusan Hakim Peradilan

Pidana	
.....	91

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Peradilan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Sebuah

Kelemahan Pada Undang-Undang Tipikor.....	121
---	-----

B.1. Kelemahan Pada Undang-Undang Tipikor Sebagai Sebuah Hambatan...	125
--	-----

B.2.Solusi Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Peradilan Tindak

Pidana Korupsi Karena Faktor Kelemahan Undang-Undang

Tipikor

.....	
.....	145

BAB IV PENUTUP

A.

Kesimpulan

.....	
.....	161

B.

Saran

.....	
.....	162

DAFTAR

PUSTAKA

.....
..... 164